

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DI KABUPATEN BANYUMAS

Indra Gunawan^{1*}, Paulus Israwan Setyoko², T Tobirin³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*indra.gunawan@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, program tersebut dimulai sejak tahun 2015. Program yang berlangsung lama tersebut rupanya belum dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya. Hal tersebut ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan masih lemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan dan menjelaskan gagalnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas dengan lokus Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 20 desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan karena pendampingan yang ada baru dapat mewujudkan partisipasi yang ada masih sebatas mobilisasi, belum merupakan partisipasi yang sesungguhnya. P3MD gagal dalam memberdayakan masyarakat karena belum dapat meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai organisasi lokal di Kabupaten Banyumas dengan baik. Kapasitas organisasi lokal masih lemah karena belum pendampingan yang kurang intensif sehingga para pengurus organisasi lokal belum memiliki bekal yang cukup tentang ilmu-ilmu pemberdayaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Organisasi Lokal

Abstract

The Village Community Development and Empowerment Program (P3MD) is an effort to develop community independence and welfare by increasing knowledge, attitudes, skills, behavior, abilities, awareness, and utilizing resources through establishing policies, programs, activities, and assistance that are in accordance with the essence of the problem and prioritize the needs of the Village community. In Banyumas Regency, Central Java Province, the program was started in 2015. It seems that this long-running program has not been able to create an empowered society. This is indicated by the still high poverty rate and the weak community involvement in the development process. The purpose of this study is: to describe and explain the failure of the Village Community Development and Empowerment Program (P3MD) in empowering communities in Banyumas Regency. This study used qualitative methods with research locations in Banyumas Regency with the locus of Cilongok District, Banyumas Regency consisting of 20 villages. The conclusion of this research is that the Village Community Development and Empowerment Program (P3MD) in Banyumas Regency has not been successful in empowering the community to actively participate in development planning, implementation and monitoring because the existing assistance can only realize that existing participation is still limited to mobilization, not yet participation. The real. P3MD failed to empower the community because it had not been able to properly increase the capacity of social institutions as local organizations in Banyumas Regency. The capacity of local organizations is still weak because there is no less intensive assistance so that the administrators of local organizations do not have sufficient knowledge about empowerment.

Keywords: Community Empowerment, Village Development, Local Organizations

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian desa. Paradigma pemberdayaan menganggap bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya ketika masyarakat diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya dimiliki untuk dapat digunakan dalam membangun masyarakat.. (Friedmann, 1992) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan menekankan pada pembangunan dengan mengutamakan kebijakan melalui pengambilan keputusan yang otonom untuk melindungi kepentingan rakyat dengan berlandaskan pada sumberdaya sendiri, melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran di masyarakat melalui pengamatan langsung. Selanjutnya, Friedman menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan adalah paradigma konsep pembangunan manusia yang kemunculannya dikarenakan adanya 2 permasalahan, yaitu: harapan dan kegagalan.

Di Indonesia, ada beberapa program untuk memberdayakan masyarakat yang dimulai sejak awal tahun 1980-an seperti Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT), kemudian tahun 1990-an ada Inpres Desa Tertinggal (IDT), awal tahun 2000-an ada Program Pengembangan Kecamatan (PPK), mulai tahun 2007 ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Mulai tahun 2015 ada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) setelah UU Desa disahkan pada tahun sebelumnya. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) diluncurkan untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia melalui pemerintahan Desa. Tujuan Umum P3MD adalah untuk menciptakan kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan, serta meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas sudah berjalan selama 8 tahun, sejak tahun 2015 sampai 2022. Dengan gelontoran dana yang banyak dan juga adanya pendampingan dari tenaga profesional semestinya bisa mengentaskan Kecamatan Cilongok dari kemiskinan, tapi dalam kenyataannya malah menjadi ranking satu kecamatan miskin ekstrim di Kabupaten Banyumas. Indikator keberdayaan masyarakat menurut Hahemi, Schuler, dan Riley diantaranya adalah sekuritas ekonomi (memiliki rumah, tabungan, dan menggunakan uang tunai) dan kemampuan untuk melakukan pembelian barang-barang kebutuhan. Angka kemiskinan yang tinggi menunjukkan tidak terpenuhinya indikator keberdayaan ,yang berarti adanya kegagalan dalam mewujudkan tujuan dari pemberdayaan, juga menunjukkan kegagalan memenuhi salah satu dari tujuan SDGS Desa nomor 1 yaitu desa tanpa kemiskinan. Ini menjadi salah satu kesenjangan antara teori dan tujuan program dengan kenyataan di lapangan.

Indikator keberdayaan masyarakat menurut Hahemi, Schuler, dan Riley diantaranya adalah kesadaran politik dan hukum; dan partisipasi dalam protes publik dan kampanye politik. Kurang optimalnya lembaga mitra desa dan masyarakat desa dalam memahami hak-haknya dalam pembangunan desa, ketidakberdayaan dalam ikut melakukan proses politik dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan pembangunan desa menunjukkan adanya kegagalan dalam proses pemberdayaan. Hal tersebut juga menunjukkan gagalnya pencapaian tujuan dari SDGS no 17 dan 18 yaitu kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Dengan adanya beberapa gap di atas maka ada salah dengan implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan dan menjelaskan gagalnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Banyumas

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Terkait dengan pengertian pemberdayaan, Fear and Schwarzweller (1985) (Fear, F.A.; Schwarzweller, 1985) mengemukakan bahwa *pemberdayaan* dipahami sebagai: “*a process in which increasingly more members of a given area or environment make and implement socially responsible decisions, where the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others*”.

Dalam hubungan ini, Robbins, Chatterjee, & Canda (1998) (Robbins et al., 1998) secara singkat menyatakannya sebagai berikut: *Empowerment-`process by which individuals and groups gain power, access to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals* “. Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.

Narayan (2002) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat terdiri dari empat aspek yaitu:

a. Akses Informasi

Komunikasi yang terjalin baik terjadi karena adanya informasi yang dimiliki masing-masing individu yang dapat merekatkan hubungan mereka. Adanya informasi yang cukup, proses pemberdayaan menjadi lebih mudah karena pelayanan dari yang memberikan dan menerima pemberdayaan termasuk dalam pemberdayaan masyarakat.

b. Inklusi dan Partisipasi

Keseluruhan individu yang terlibat dalam proses pemberdayaan, baik pelaku maupun subyek pemberdayaan. Partisipasi yang dimaksud yaitu kontribusi yang diberikan individu untuk keberhasilan kelompok dalam pemberdayaan. Inklusi dan partisipasi saling bergandengan yaitu meningkatkan kemauan subyek pemberdayaan agar mampu diberdayakan.

c. Akuntabilitas

Kemampuan seseorang untuk dapat bertindak secara tepat. Dalam pemberdayaan, akuntabilitas bertujuan ketepatan dalam mengambil keputusan, management waktu, penghitungan dana, tenaga yang dibutuhkan, dan kemampuan memprediksi dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

d. Kapasitas organisasi local

Mengacu pada kemampuan kelompok untuk dapat bekerjasama, mengikuti organisasi, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, menyelesaikan masalah, dan menjangkau kemungkinan penyelesaian dari berbagai konflik.

2. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Di Indonesia, ada beberapa program untuk memberdayakan masyarakat yang dimulai sejak awal tahun 1980-an seperti Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT), kemudian tahun 1990-an ada Inpres Desa Tertinggal (IDT) , awal tahun 2000-an ada Program Pengembangan Kecamatan (PPK), mulai tahun 2007 ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Mulai tahun 2015 ada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) setelah UU Desa disahkan pada tahun sebelumnya. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) diluncurkan untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia melalui pemerintahan Desa.

Tujuan Umum P3MD adalah untuk menciptakan kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan, serta meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan

Di era Presiden Joko Widodo, melalui Nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, program pemberdayaan diarahkan untuk memandirikan desa sesuai amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya secara praksis dilaksanakan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Dengan dasar ini, melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD salah satu ditjen pada Kemendes PDTT) dibentuk program. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dengan misi memberdayakan desa sebagai self-governing community, yakni desa yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa yang selanjutnya diatur lebih detail lagi dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa. Pendampingan Masyarakat Desa oleh TPP bersifat membantu Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam serangkaian kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. (Taylor et al., 2016) menyebutkan penelitian kualitatif menghasilkan data tertulis atau lisan dari fenomena atau perilaku yang diteliti. (Guba dan Lincoln, 2005) menyebutkan, penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari hal-hal dalam setting alaminya, mencoba untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena yang diteliti. (Merriam, 2009) menyebutkan, peneliti kualitatif tertarik untuk memahami orang-orang yang diteliti tentang dunia mereka. Penelitian kualitatif berdasarkan pandangan di atas adalah penelitian yang mencoba melihat seting alami dari yang diteliti dengan peneliti sebagai alat utamanya dan menghasilkan data tertulis atau lisan dari fenomena yang diteliti.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Banyumas dengan lokus Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 20 desa yaitu: Desa Batuanten, Desa Cikidang, Desa Cilongok, Desa Cipete, Desa Gununglurah, Desa Jatisaba, Desa Kalisari, Desa Karanglo, Desa Karangtengah, Desa Kasegeran, Desa Langgongsari, Desa Pageraji, Desa Panembangan, Desa Panusupan, Desa Pejogol, Desa Pernasidi, Desa Rancamaya, Desa Sambirata, Desa Sokawera, Desa Sudimara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sampai Juli 2023.

3. Informan Penelitian

Ada beberapa pihak atau orang yang akan jadi informan dalam penelitian kali ini. Mereka dipilih karena dinilai mengetahui (*purposive*) tentang kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa yaitu :

- a. Kasi FLKD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas
- b. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas
- c. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan
- d. Kepala Desa
- e. Sekretaris Desa
- f. Pengurus LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- g. Pengurus Karang Taruna
- h. Pengurus PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- i. Pengurus RT (Rukun Tetangga)
- j. Pengurus RW (Rukun Warga)
- k. Pengurus Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
- l. Pengurus Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan beberapa cara. (Klassen et al., 2012) menyebutkan bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara dan observasi. (Bowen, 2009) menyebut, dokumentasi yang didapatkan dan kemudian dianalisis merupakan prosedur pengumpulan data pelengkap dalam mendukung triangulasi sumber data dan pembangunan teori.

a. Wawancara

Jamshed (2014) menyebutkan, wawancara dilakukan untuk menggali pandangan, pengalaman, keyakinan, dan motivasi informan. Wawancara terdiri atas wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan pertanyaan yang tanpa variasi dan tidak memunculkan pertanyaan lanjutan. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara menggunakan beberapa pertanyaan kunci yang membantu untuk mendefinisikan area yang akan dijelajahi, tetapi juga memungkinkan pewawancara atau orang yang diwawancarai menyimpang untuk mengejar ide atau tanggapan lebih detail. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang diawali dengan sedikit ide dan pertanyaan pembuka akan jadi kunci dan kemudian mengalir sesuai respons dari informan. Wawancara pada penelitian ini menggunakan semi terstruktur dengan membuat beberapa pertanyaan kunci dan dikembangkan untuk mendapatkan tanggapan lebih detail. Wawancara semi terstruktur ini juga didefinisikan sebagai wawancara mendalam karena informan harus menjawab pertanyaan terbuka.

b. Observasi

Cara melakukan observasi dibagi dalam tiga jenis (Ciesielska dkk, 2018). Pertama, pengamat berpartisipasi penuh dan berbaur dengan lingkungan yang mereka teliti, termasuk menyesuaikan gaya hidup dan kebiasaan objek penelitian. Cara ini dikritik karena bisa menghilangkan sikap analitis. Kedua, pengamat berpartisipasi sebagian yakni ikut

mengambil bagian dalam interaksi tidak mendalam sehingga tidak menjadi beban kelompok yang diteliti. Ketiga, pengamat non-peserta atau observasi non-*participant* yakni mengamati saja tanpa terlibat dalam interaksi objek yang diteliti sehingga terjaga kenetralannya. Penelitian kali ini menggunakan observasi non-*participant*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa didapatkan dari buku, arsip, dan sumber tertulis terkait, untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi. Tinjauan dokumentasi yang menyeluruh dan sistematis memberikan informasi latar belakang yang membantu memahami konteks sosiokultural, politik, dan ekonomi dari program yang diimplementasikan (Bowen, 2009).

5. Analisis data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis model interaktif (Miles et al., 2014). Dalam analisis tersebut, selain pengumpulan data, ada tiga aktivitas penting yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut dijelaskan tiga aktivitas tersebut (Miles et al., 2014).

a. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah langkah yang dilakukan pada data yang diperoleh di lapangan baik catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Langkah tersebut adalah proses pemilihan, pemfokusan, abstraksi, dan atau mentransformasikan data. Kondensasi data ini dilakukan terus menerus selama penilaian kualitatif. Bahkan, juga sudah dilakukan sebelum data dikumpulkan, yakni ketika peneliti memutuskan kerangka konseptual, kasus, dan pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian. Data kondensasi adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, menyortir, memfokuskan, mengatur data sedemikian rupa cara agar kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data membantu peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu. Bentuk penyajian data bisa dalam bentuk teks, matrik, grafik, bagan. Penyajian data ini bagian dari analisis. Sebab, mendesain tampilan seperti misalnya memutuskan penyajian data dalam bentuk apa, adalah merupakan aktivitas analitik.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan dalam penelitian. Selain menarik kesimpulan, juga memverifikasi kesimpulan tersebut untuk menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya agar valid. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, tiga jenis aktivitas di atas, merupakan proses interaksi dan bersiklus. Peneliti terus bergerak di antara empat mode (termasuk pengumpulan data) ini selama pengumpulan data dan kemudian bolak-balik antara memadatkan, menampilkan, dan menggambar kesimpulan / memverifikasi untuk sisa penelitian (Miles et al., 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengulas pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas akan menggunakan teori dari Narayan (2002) bahwa pemberdayaan masyarakat terdiri dari empat aspek yaitu: Akses Informasi, Inklusi dan Partisipasi, Akuntabilitas, dan Kapasitas Organisasi Lokal yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Akses Informasi

Menurut Narayan, komunikasi yang terjalin baik terjadi karena adanya informasi yang dimiliki masing masing individu yang dapat merekatkan hubungan mereka. Adanya informasi yang cukup, proses pemberdayaan menjadi lebih mudah karena pelayanan dari yang memberikan dan menerima pemberdayaan termasuk dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam beberapa wawancara dengan narasumber, akses informasi masyarakat tentang regulasi terbaru, informasi tentang pembangunan desa, dan kebijakan pemerintah masih belum maksimal. Masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, bahkan pemerintah desa pun masih belum mendapatkan informasi dan regulasi terbaru yang berkaitan dengan desa, misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri no 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Beberapa pengurus LKD belum tau tentang peraturan tersebut.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pengurus lembaga kemasyarakatan desa masih dan masyarakat desa belum dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang perencanaan pembangunan, kegiatan pembangunan, dan juga pendanaannya. Hal tersebut menyebabkan lembaga kemasyarakatan desa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam menggerakkan masyarakat untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kecamatan Cilongok belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat desa untuk dapat mewujudkan akses informasi pembangunan desa yang transparan dan akuntabel. Pendamping desa masih kurang dalam mendampingi kelembagaan masyarakat dan masyarakat desa secara maksimal sehingga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa belum dapat berdaya dan sadar terhadap hak-haknya, termasuk untuk mendapatkan akses informasi pembangunan desa.

2. Inklusi dan Partisipasi

Keseluruhan individu yang terlibat dalam proses pemberdayaan, baik pelaku maupun subyek pemberdayaan. Partisipasi yang dimaksud yaitu kontribusi yang diberikan individu untuk keberhasilan kelompok dalam pemberdayaan. Inklusi dan partisipasi saling bergandengan yaitu meningkatkan kemauan subyek pemberdayaan agar mampu diberdayakan. Inklusi dan partisipasi pada subyek pemberdayaan menunjukkan adanya peran serta yang terbuka bagi siapapun warga masyarakat termasuk kelompok marjinal, orang miskin dan difabel.

Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan membantu dan/atau memberikan pendampingan secara intensif, baik kepada individu masyarakat desa ataupun kelembagaan desa dalam pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, Pendamping Desa P3MD hendaknya dapat memberikan bantuan dalam pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, baik kepada individu masyarakat desa, ataupun pada kelembagaan desa. Dalam konteks pengelolaan pembangunan Desa, Pendamping Desa P3MD hendaknya dapat membantu masyarakat dan kelembagaan Desa, mulai dari Pendataan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, sampai pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pendamping desa hendaknya dapat membantu; pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat desa, penguatan kelembagaan desa dinamis, serta penguatan budaya desa adaptif. Sehingga, melalui kegiatan asistensi pendampingan, akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa, mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa, memfokuskan arah kebijakan Perencanaan.

Pada kenyataannya, peran pendamping desa dalam memberdayakan masyarakat belum dapat terwujud sesuai harapan. Salah satunya adalah pendampingan dalam mewujudkan inklusi dan partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan dimulai dari perencanaan, yaitu melalui musyawarah-musyawah desa yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa. Peran dari pendamping P3MD dalam memberdayakan masyarakat salah satunya adalah dengan cara memfasilitasi musyawarah-musyawah desa, memberikan sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang regulasi musyawarah desa terbaru, kemudian memastikan agar musyawarah dapat berjalan sesuai azas musyawarah yang tercantum dalam Permendes

no 16 Tahun 2019 yaitu: musyawarah mufakat, keadilan, keterbukaan, transparan, akuntabel, partisipatif, demokratis, dan kesetaraan.

Jam kerja pendamping desa sebagian besar masih dialokasikan untuk mendampingi pemerintah desa sehingga pendampingan kepada lembaga masyarakat, kelompok masyarakat, kaum difabel, masyarakat miskin dan marginal masih kurang. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pembangunan, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak masyarakat dalam pembangunan sehingga lembaga masyarakat, masyarakat umum, masyarakat miskin, difabel, dan kaum marginal tidak bisa berperan serta secara maksimal. Kurangnya pendampingan dari pendamping P3MD dalam memberdayakan lembaga masyarakat, masyarakat umum, masyarakat miskin, kaum difabel dan kaum marginal menyebabkan dan partisipasi mereka masih lemah, sehingga peran pemerintah desa masih dominan.³

3. Akuntabilitas

Merupakan kemampuan seseorang untuk dapat bertindak secara tepat. Dalam pemberdayaan, akuntabilitas bertujuan ketepatan dalam mengambil keputusan, management waktu, penghitungan dana, tenaga yang dibutuhkan, dan kemampuan memprediksi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Akuntabilitas sosial di desa perlu diperkuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat demi terjaminnya tata kelola yang baik. Pendamping Desa P3MD bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat, termasuk masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya, dengan cara fasilitasi agar mereka mau dan mampu menyampaikan aspirasi.

Konsep akuntabilitas sosial memastikan bahwa pemerintah menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab. Inti akuntabilitas sosial adalah munculnya beragam mekanisme yang bertujuan mereduksi dan mungkin juga menetralisasi kekuasaan yang dimiliki aktor penguasa. Dalam konteks pemerintahan di desa, penguatan akuntabilitas sosial makin dibutuhkan, mengingat besarnya kewenangan pemerintah desa dalam mengelola.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada dimasyarakat atau yang dimiliki oleh para pengguna pemerintahan dan pembangunan desa. Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa disampaikan kepada Bupati serta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menginformasikan pertanggung jawaban kepada masyarakat baik secara lisan maupun melalui penggunaan papan-papan informasi yang ada.

Di Kecamatan Cilongok, pemerintah desa masih mendominasi peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti LPMD, PKK, Karang Taruna, RT, RW dan Posyandu saat ini seolah-olah hanya sebatas melengkapi struktur organisasi dalam pemerintahan desa saja. Tidak mengetahui tujuan mengapa dibentuk, apa tugas dan wewenangnya sebagai mitra aparat desa, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dari uraian di atas penguatan akuntabilitas sosial di desa membutuhkan proses panjang dan kerja sama di antara pihak kecamatan, Pendamping Desa P3MD, hingga organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi dan koordinasi antarpihak merupakan kunci untuk menjalankan dua strategi di atas agar mampu mempercepat proses peningkatan kapasitas dan penguatan peran pemangku kepentingan di desa secara keseluruhan. Untuk saat ini di Kecamatan Cilongok, hal tersebut belum dapat terwujud, pertanggungjawaban pemerintah desa belum dapat diakses secara mudah oleh seluruh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) belum dapat mewujudkan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang mempunyai bargaining position yang tinggi dan berani untuk mengakses pertanggungjawaban pemerintah desa dan juga mengevaluasinya.

4. Kapasitas organisasi lokal

Kapasitas organisasi lokal ini mengacu pada kemampuan kelompok untuk dapat bekerjasama, mengikuti organisasi, dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, menyelesaikan masalah, dan menjangkau kemungkinan penyelesaian dari berbagai konflik.

Organisasi lokal yang dibahas dalam penelitian ini adalah organisasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Dari uraian di atas memperlihatkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa di Kecamatan Cilongok masih lemah. Kapasitas mereka masih kurang karena belum memiliki bekal yang cukup tentang ilmu-ilmu pemberdayaan. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sejatinya menjadi aktor pemberdayaan di tingkat desa. Apabila LKD lemah, maka pemberdayaan masyarakat pun akan tidak maksimal. Selain karena kapasitas yang kurang, posisi lembaga kemasyarakatan desa menjadi lemah karena belum mempunyai legal standing yang sesuai dengan regulasi terbaru. Di Kecamatan Cilongok belum ada desa yang punya peraturan desa tentang LKD sesuai dengan regulasi terbaru. Lemahnya peran LKD tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akses Informasi

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat desa untuk dapat mewujudkan akses informasi pembangunan desa yang transparan dan akuntabel karena pendamping desa P3MD masih kurang maksimal dan intensif dalam mendampingi kelembagaan masyarakat dan masyarakat desa sehingga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa belum dapat berdaya dan sadar terhadap hak-haknya, termasuk untuk mendapatkan akses informasi pembangunan desa.

2. Inklusi dan Partisipasi

a. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Banyumas belum berhasil dalam memberdayakan masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan karena pendampingan yang ada baru dapat mewujudkan partisipasi yang ada masih sebatas mobilisasi, belum merupakan partisipasi yang sesungguhnya. Banyak stakeholder dan masyarakat yang belum tahu tentang hak-hak mereka dalam pembangunan, terutama masyarakat miskin, difabel dan marginal.

b. Jam kerja pendamping desa sebagian besar masih dialokasikan untuk mendampingi pemerintah desa sehingga pendampingan kepada lembaga masyarakat, kelompok masyarakat, kaum difabel, masyarakat miskin dan marginal masih kurang. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pembangunan, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak masyarakat dalam pembangunan sehingga lembaga masyarakat, masyarakat umum, masyarakat miskin, difabel, dan kaum marginal tidak bisa berperan serta secara maksimal. Kurangnya pendampingan dari pendamping P3MD dalam memberdayakan lembaga masyarakat, masyarakat umum, masyarakat miskin, kaum difabel dan kaum

marginal menyebabkan dan partisipasi mereka masih lemah, sehingga peran pemerintah desa masih dominan.

3. Akuntabilitas

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) belum dapat mewujudkan penguatan akuntabilitas sosial di desa karena pendampingan yang ada belum dapat mewujudkan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang mempunyai bargaining position yang tinggi dan berani untuk mengakses pertanggungjawaban pemerintah desa dan juga mengevaluasinya.

4. Kapasitas organisasi lokal

P3MD gagal dalam memberdayakan masyarakat karena belum dapat meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebagai organisasi lokal di Kabupaten Banyumas dengan baik. Kapasitas organisasi lokal masih lemah karena belum pendampingan yang kurang intensif sehingga para pengurus organisasi lokal belum memiliki bekal yang cukup tentang ilmu-ilmu pemberdayaan. Selain karena kapasitas yang kurang, posisi lembaga kemasyarakatan desa menjadi lemah karena belum mempunyai legal standing yang sesuai dengan regulasi terbaru. Di Kecamatan Cilongok belum ada desa yang punya peraturan desa tentang LKD sesuai dengan regulasi terbaru. Lemahnya peran LKD tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

SARAN

1. Akses Informasi

- a. Perlu dibentuk tim atau petugas Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) yang didanai oleh desa. Tugasnya adalah mengupdate website desa dengan informasi-informasi terkini tentang pembangunan dan desa dan juga tentang laporan kegiatan pembangunan. Informasi yang tersedia di website akan memudahkan masyarakat dalam mengakses sehingga mereka dapat berperan lebih kuat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan juga pengawasan pembangunan desa
- b. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Pemerintah Kecamatan dan Pendamping desa P3MD lebih sering mendatangi lembaga masyarakat desa, kelompok masyarakat dan masyarakat umum dalam rangka penyadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat, sekaligus menjadi penyambung informasi yang terputus.

2. Inklusi dan Partisipasi

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Pemerintah Kecamatan dan Pendamping P3MD lebih intens dalam mendampingi lembaga masyarakat, kelompok masyarakat, kaum difabel, masyarakat miskin dan marginal dalam rangka peningkatan kapasitas sekaligus memberikan penyadaran sehingga mereka bisa mendapatkan ruang yang lebih luas dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

3. Akuntabilitas

Membuat system pengawasan berbasis masyarakat atau Community Based Monitory (CBM) agar masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang mempunyai bargaining position yang tinggi dan berani untuk mengakses pertanggungjawaban pemerintah desa dan juga mengevaluasinya.

4. Kapasitas organisasi lokal

- a. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Pemerintah Kecamatan dan Pendamping P3MD memfasilitasi agar setiap desa mempunyai peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa yang sesuai dengan regulasi terbaru
- b. Peningkatan kapasitas yang lebih intensif melalui pelatihan-pelatihan ataupun forum grup discussion kepada para pengurus lembaga kemasyarakatan desa agar mereka memiliki bekal ilmu yang cukup dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, J. (1996). *Sharing the City: Community Participation in Urban Management*. Earthscan.
- Allen, A. (1999). *The Power of Feminist theory: Domination, Resistance, Solidarity*. Press Boulder, CO.
- Bagnall, A. M., Trigwell, J., Heisse, C., Quick, A., Southby, K., Woodward, J., South, J., & Button, D. (2020). Impact of a community empowerment programme in disadvantaged UK neighbourhoods: results of a survey. *European Journal of Public Health, 30*(Supplement_5). <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa166.146>
- Basir, Muammar Alkadafi; Fithriyyah, M. U. (2020). Evaluasi Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal El-Riyasah, 11*(2).
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Brophy, P.; Weissbourd, R.; Beideman, A. . (2017). Transformative Economies: Emerging Practices Foraligning Growth and Inclusion. *Philadelphia: Federal Reserve Bank of Philadelphia*.
- Chalid, P. (2005). *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberian, Dan Konflik*. Kemitraan Universitas Syiah Kuala.
- Chambers, R. (1995). *Rural Development : Putting The Last First*. New York.
- Cook, S. (1994). The Cultural Implications of Empowerment. *Empowerment in Organizations, 2*(1), 9–13. <https://doi.org/10.1108/09684899410054625>
- Cristina, H. M. (2020). Community Empowerment Program to Increase Community Income in Sitimulyo Village, Piyungan District, Yogyakarta. *Humaniora Research Journal*.
- Del Arco, I., Ramos-Pla, A., Zsembinszki, G., Gracia, A. de, & Cabeza, L. F. (2021). Implementing sdgs to a sustainable rural village development from community empowerment: Linking energy, education, innovation, and research. *Sustainability (Switzerland), 13*(23). <https://doi.org/10.3390/su132312946>
- Denhardt, J. V. (2016). *The New Public Service: Serbing, Not Steering*. Routledge.
- Farida; Qabandiya, M. K. (2022). Community Empowerment Program in Indonesia. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*.
- Fear, F.A.; Schwarzweiler, H. K. (1985). *Research In Rural Sociology and. Development*. Jai Press Inc.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell.
- Galià; Farnworth, C. R. . (2019). Power through: A New Concept in The Empowerment Discourse. *Global Food Security, 13*–17. www.elsevier.com/locate/gfs
- Gammage, S., Kabeer, N., & van der Meulen Rodgers, Y. (2016). Voice and Agency: Where Are We Now? *Feminist Economics, 22*(1), 1–29. <https://doi.org/10.1080/13545701.2015.1101308>
- Glaserfeld, E. V. . (1987). *Learning as A Constructive Activity*. In *Proceedings of PME-NA, Montreal, Canada. Problems of Representation in the Teaching and Learning of Mathematics*. Lawrence Erlbaum.
- Gralewicz, P. (2022). Community Empowerment as a Tool to Reduce Unemployment: Contrasting Cases of Iceland and Ireland. In *Community Empowerment, Sustainable Cities, and Transformative Economies* (hal. 605–619). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5260-8_33
- Guba, Egon G.; Lincoln, Y. (2005). "Paradigmatic Controversies Contradictions, and Emerging Confluences." In *The Sage Handbook of Qualitative Research* (Y. S. . Denzin, Norman K.; Lincoln (ed.)). Sage Publication.
- Handini, Sri; Sukesi; Astuti, H. K. ; (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*. Scopindo Media Pustaka.
- Hjorth, P. . (2003). Knowledge Development and Management for Urban Poverty Alleviation. *Habitat*

International, 27, 381–392.

- Hutauruk, Aldi; Husni, T. (2022). Village Community Development and Empowerment Program Effectiveness (P3MD) in Hutauruk Hasundutan Village, Sipoholon District, Tapanuli Utara District in 2020. *Scientific Journal of Local Political Studies and Development*.
- Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice*. Longman Australia. Pty.Ltd.
- Jasper, J. M. (2010). "Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action?" *Sociology Compass*, 10, 965–976.
- Jinwei, W., Xinlei, C., Liyan, Z., Mengdi, J. I. N., & Deguang, Y. U. (2021). 乡村振兴战略视角下民族村寨社区旅游增权研究 —— 以四川省石椅羌寨为例. *Journal of Zhejiang University (Science Edition)*, 48(1). <http://www.zjujournals.com/sci>
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo.
- Keneilwe; Dipholo, K. (2020). Empowering Botswana's Rurals Communities through The Sustainable Livelihood Approach: Opportunities and Constraints. *ASEAN Journal of Community Engagement*.
- Klassen, A. C., Creswell, J., Plano Clark, V. L., Smith, K. C., & Meissner, H. I. (2012). Best practices in mixed methods for quality of life research. *Quality of Life Research*, 21(3), 377–380. <https://doi.org/10.1007/s11136-012-0122-x>
- Laverack, G. (2001). An Identification and Interpretation of The Organizational Aspects of Community Empowerment. *Community Development Journal*, 36(2), 134–145.
- Mardikanto, Totok; Soebiato, P.; (2013). *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Moleong.
- Mardikanto, Totok; Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif KebijakanPubik*. Penerbit Alfabeta.
- Merriam, S. B. . (2009). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. CA: Jossey-Bass.
- Miles, M.B; Huberman, A.M; Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3 ed.). Sage Publications.
- Muazansyah, Imam; Irsyad, S. (2022). Effectiveness of Village Fund Management and Community Empowerment Assistance in Bulungan District. *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, 20(1).
- Munandar. (2021). Community Empowerment Discourse inThe National Development Policy. *Journal of SocialPolitical Sciences*, 2(1).
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction. A Sourcebook*. The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.
- Nigro, F. A. (1977). *Modern Public Administration*. Harper and Row.
- Palutturi, S., Saleh, L. M., Rachmat, M., Malek, J. A., & Nam, E. W. (2021). Principles and strategies for aisles communities empowerment in creating Makassar Healthy City, Indonesia. *Gaceta Sanitaria*, 35, S46–S48. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.12.013>
- Pansardi, P. (2012). Power to and power over : two distinct concepts of power? *Journal of Political Power*, 5(1), 73–89. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2012.658278>
- Parsons, T. (1991). *The Social System*. Routledge.
- Pranarka, A.M.W.; Moeljarto, V. (1996). *Pemberdayaan Masyarakat, dalam Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. , CSIS, Jakarta (A. Onny, S; Prijonodan (ed.)). CSIS.
- Projono, O.S; Pranarka, A. M. W. . (1996). *Pemberdayan: Konsep, Kebijakan dan implementasi*. CSIS.

- Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121-148. <https://doi.org/10.1007/BF00919275>
- Richmond, Oliver P.; Annika, Bjorkdahl; Gezim, V. (2016). *Rethinking Peace and Conflict Studies*. Springer.
- Robbins, Susan P.; Pranab, Chatterjee; Edward, R. C. (1998). *Contemporary Human Behavior Theory : A Critical Perspective for Social Work*. Allyn and Bacon.
- Rowlands, J. (1997). *Questioning Empowerment: Workingwith Women in Honduras*.
- Sadan, E. (1997). *Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Hakibbutz Hameuchad.
- Safuridar; Hanum, N.; (2018). Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). *urnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 2(2).
- Speer, P. W.; Jackson, C. B.; Peterson, N. A. . (2001). *The Relationship Between Social Cohesion and Empowerment: Support and New Implications for Theory*. *HealthEducation and Behavior*, 28(6), . 28(6), 716-732.
- Suherman, M. I. . T. R. (2019). Empowering Youth Development and Empowerment Program (P3MD) in the District of Lappariaja, Bone Regency, South Sulawesi Province, Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*.
- Swift C, L. G. (1987). (1987). *Empowerment: An Emerging Mental Healt Technology*. J. Primary Prevention.
- Taylor, Steven J.; Bogdan, Robert; DeVault, M. L. (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource (4th Editio)*. John Willey & Sons.
- Timothy, D. J. . (2007). *Empowerment and Stakeholder Participation in Tourism Destination Communities (In A.Churc)*. Routledge.
- Todaro, M. P. (1983). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Terjemahan)* (G. Indonesia (ed.)).
- Wallerstein, N. . (2012). *What is the Evidence on Effectivenessof Empowerment to Improve Health? WHO RegionalOffice for Europe, Copenhagen (Health EvidenceNetwork Report)*. http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0010/74656/E88086.pdf